

**TESIS**

**EKSISTENSI SURAT PENAWARAN PUTUSAN KREDIT (SPPK)  
DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG MEMUAT KLAUSULA BAKU  
PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.  
KANTOR CABANG BINTARO**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh  
Gelara Magister Kenotariatan (S2)  
di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Disusun oleh :  
**RINGGO YENEDY**  
2020123063



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2024**

**EKSISTENSI SURAT PENAWARAN PUTUSAN KREDIT (SPPK) DALAM  
PERJANJIAN KREDIT YANG MEMUAT KLAUSULA BAKU  
PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.  
KANTOR CABANG BINTARO**

**Ringgo Yenedy, 2020123063, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum  
Universitas Andalas, Padang, 2024.**

**ABSTRAK**

Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dalam praktik perbankan yang lazim di Indonesia, perjanjian kredit bank yang dipakai adalah perjanjian standar atau perjanjian baku, yang klausul-klausulnya telah disusun sebelumnya oleh pihak bank, sehingga nasabah sebagai calon debitur hanya mempunyai pilihan antara menerima seluruh isi klausul-klausul itu baik sebagian atau seluruhnya atau menolak yang berakibat nasabah tidak akan menerima kredit tersebut. Sebagai mitigasi risiko dalam penerapan perjanjian baku, kepada debitur diberikan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) atau lebih lazimnya disebut *offering letter* terlebih dahulu. *Offering letter* merupakan surat penawaran bank atas persetujuan kredit yang ditujukan kepada debitur. Apabila debitur setuju, maka *offering letter* tersebut dijadikan dasar pembuatan akta kredit. Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang hendak diteliti yaitu : 1) Bagaimana eksistensi penggunaan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) dalam perjanjian kredit perbankan yang memuat klausula baku, dan 2) Bagaimana kedudukan Notaris dalam pelaksanaan perjanjian kredit yang diawali dengan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK). Untuk memecahkan permasalahan digunakan pendekatan yuridis empiris dengan data utamanya adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa : 1) Penggunaan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) dalam perjanjian kredit perbankan yang memuat klausula baku merupakan suatu mitigasi risiko guna menghindari bank dari adanya kemungkinan resiko yang dapat merugikan pihak bank, baik resiko hukum, resiko reputasi, dan resiko kredit, Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) sebagai dasar dibuatnya suatu perjanjian kredit. 2) Kedudukan Notaris dalam pelaksanaan perjanjian kredit yang diawali dengan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) adalah sama dengan perjanjian pada umumnya. Notaris menjalankan perannya sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat akta otentik. Notaris memiliki peran penting dalam mewujudkan kesetaraan antara kepentingan kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit perbankan tersebut. Peran notaris dalam penerbitan perjanjian kredit kepada pihak perbankan dan pihak debitur merupakan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian kredit tersebut.

Kata kunci : perjanjian, kredit, notaris.

**EKSISTENSI SURAT PENAWARAN PUTUSAN KREDIT (SPPK) DALAM  
PERJANJIAN KREDIT YANG MEMUAT KLAUSULA BAKU  
PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.  
KANTOR CABANG BINTARO**

**Ringgo Yenedy, 2020123063, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum  
Universitas Andalas, Padang, 2024.**

**ABSTRACT**

Article 1313 of the Civil Code states: "Agreement is an act by which one or more people bind themselves to one or more other people." In common banking practice in Indonesia, the bank credit agreement used is a standard agreement or standard agreement, the clauses of which have been previously prepared by the bank, so that the customer as a prospective debtor only has the choice between accepting the entire contents of the clauses, either in part or completely or refuse, which will result in the customer not receiving the credit. As risk mitigation in implementing standard agreements, debtors are given a credit decision offer letter more commonly called an offering letter. An credit decision offering letter is a bank offer letter for credit approval addressed to the debtor. If the debtor agrees, then the offering letter is used as the basis for making a credit deed. Based on the background above, the problems to be studied are: 1) What is the existence of the use of Credit Decision Offer Letters (SPPK) in banking credit agreements which contain standard clauses, and 2) What is the position of a Notary in implementing credit agreements that begin with a credit decision offering letter. To solve the problem, an empirical juridical approach is used with the main data being primary data and secondary data. The results of the research and discussion show that: 1) The use of a credit decision offering letter in a banking credit agreement which contains standard clauses is a risk mitigation to prevent the bank from possible risks that could harm the bank, including legal risks, reputation risks and risks. credit, credit decision offering letter as the basis for making a credit agreement. 2) The Notary's position in implementing a credit agreement which begins with a credit decision offering letter is the same as in agreements in general. Notaries carry out their role as authorized officials in making authentic deeds. Notaries have an important role in realizing equality between the interests of creditors and debtors in banking credit agreements. The role of a notary in issuing credit agreements to banks and debtors is to provide legal certainty for the parties entering into the credit agreement.

Keywords: agreement, credit, notary.